

Pembangunan Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Kartika Rose Rachmadi¹, Kasuwi Saiban², Misbahul Munir³
Universitas Islam Malang¹, Universitas Merdeka Malang², Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang³

Email : tikarose@unisma.ac.id

ABSTRACT

The economic development of the people is a big problem faced by people today, and indeed The solution can only be done by Muslims himself by returning to Allah's rules, in among others by: instilling entrepreneurial traits for each individual people, build strong partnerships/networks with various parties, especially with fellow Muslims, make policies that are more pro-economic growth of the people, by supporting morally and materially sourced from zakat funds, carry out transactions and economic behavior in accordance with the rules of Islamic teachings.

Key Words : *Economic Development, Islamic Economic, Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Suatu tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana membangun ekonominya selaras dengan ideologi agamanya. Negara-negara Islam umumnya tengah menderita keterbelakangan ekonomi secara luar biasa, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya. Akibatnya, kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi ekonomi terjadi di mana-mana. Meskipun negara itu termasuk kaya sumber daya namun ekonominya kurang berkembang. Standar hidup rata-rata penduduknya masih rendah. Bahkan realitas yang memprihatinkan adalah pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya, dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata.

Model pembangunan ekonomi yang berkembang secara pesat di dunia Barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur-budaya, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada kesamaan model pembangunan antara apa yang diaplikasikan di dunia Barat dengan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam (maqashid syari'ah).

Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima pokok masalah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keterampilan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai pemimpin (khalifah) di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini

didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.

Dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional, mengapa pengalaman empiris model pembangunan dunia Barat tidak tepat untuk diterapkan di dunia Muslim, dan bagaimana seharusnya model pembangunan ekonomi dalam tinjauan maqashid syari'ah.

B. Konsep Pembangunan Perspektif Ekonomi Konvensional

Pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Kajian ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. munculnya kesadaran pada negara-negara maju bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran di mana pun.¹ Masalah-masalah ekonomi yang melanda negara-negara berkembang dan kesadaran pada negara-negara maju akan dampak kemiskinan menjadi pendorong munculnya kajian ekonomi pembangunan. Walaupun minat bangsa maju dalam menghapus kemiskinan negara terbelakang (negara berkembang) tidaklah lahir dari motif kemanusiaan, tetapi utamanya didasari oleh motif politik dan ekonomi.

Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per-kapita penduduk meingkat dalam jangka panjang. Didasarkan definisi sederhana ini Jhingan mengindikasikan pembangunan ekonomi dalam tiga cara:²

¹ Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), hal. 3

² Ibid, hal. 6-9

1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional dalam suatu jangka waktu yang panjang. Tetapi indikator ini kurang memuaskan dikarenakan tidak mempertimbangkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional nyata dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi tetapi kemunduran
2. Perkembangan ekonomi berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per-kapita dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga masih tetap mendapatkan kritikan terutama dikarenakan tidak mempertimbangkan struktur masyarakat, susunan dan besarnya penduduk, lembaga dan budaya masyarakat, pola sumber-sumber dan bahkan distribusi output ke dan antara anggota masyarakat.
3. Perkembangan ekonomi dilihat dari titik kesejahteraan ekonomi. Artinya perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional nyata per-kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. definisi ini pun tidak luput dari berbagai keterbatasan.

Definisi dan tujuan pembangunan dalam ekonomi konvensional dibahas dalam suatu kesatuan, di mana pengertian dimulai dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dari pembangunan. Misalnya, pembangunan ekonomi adalah usaha perekonomian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan hasil produksi nasional secara umum; merubah struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri, yang menjadikan bidang industri serta keahlian sebagai andalan, dan menjadikan tingkat pertambahan riil produk nasional dan pendapatan per-kapita sebagai indikator-indikator pokok bagi pembangunan ekonomi.³ Perjalanan ekonomi pembangan sebagai sebuah ilmu terus mengalami perkembangan dan peningkatan nilai, terutama terlihat dari munculnya model-model pembangunan ekonomi dengan aliran pemikiran yang beragam.

³ Lihat Bakri dalam Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hal. 24

Strategi pembangunan dalam desain teori pertumbuhan ekonomi kadang mengalami konflik tujuan yang ingin dicapai, antara tujuan kemakmuran dan keadilan. Kecenderungan inilah yang selanjutnya memunculkan teori pertumbuhan ekonomi (economic growth), pertumbuhan dengan keadilan (growth with justice) dan pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equity). Teori pembangunan adalah faktor-faktor pokok yang mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Teori adalah dasar bagi strategi pembangunan. Teori dan strategi pembangunan tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama oleh pandangan hidup masyarakatnya.

Pandangan hidup suatu bangsa memberikan warna arah (perspektif) pada suatu strategi, serta mempengaruhi pilihan teoritis mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.⁴ Tujuan dan strategi dari suatu sistem ekonomi pada hakikatnya adalah hasil logis dari pandangannya tentang dunia.⁵ Sebagai contoh misalnya, jika alam semesta termasuk sumber ekonomi di dalamnya terjadi dengan sendirinya, tanpa ada desain dan tujuan utama dari penciptanya, maka manusia akan berkehendak sebebas-bebasnya dan sesuka hatinya dalam mengeksploitasinya. Tujuan hidupnya hanya untuk mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum tanpa mempertimbangkan bagaimana merealisasikannya dan dampaknya terhadap pihak lain.

Dengan demikian suatu teori yang cocok dan dapat diterima dalam suatu sistem masyarakat dengan pandangan hidup tertentu, belum cocok bagi yang lain. Dalam konteks ini An Nabhani membedakan antara sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi (teori ekonomi). Kedua hal tersebut sama-sama membahas tentang ekonomi, akan tetapi keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ilmu ekonomi terfokus pada kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut memperbanyak maupun pengedarannya. Sementara sistem ekonomi berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusian harta kekayaan. Sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (way of

⁴ Ibid, hal. 32

⁵ Lihat Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, edisi terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 5

life) tertentu. Di lain pihak, ilmu ekonomi sebagai sains murni, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup tertentu.

Pandangan yang sama pula dikemukakan oleh Baqir Ash Shadr yang membedakan antara ekonomi sebagai sistem dan ekonomi sebagai ilmu. Sebagai sistem,⁶ ekonomi mengacu pada cara bagaimana masyarakat mengatur kegiatan ekonominya, ia mengacu pada cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya. Sistem ekonomi melingkupi sistem kepemilikan, pengaturan dan pengembangan kekayaan. Sedang sebagai ilmu, ekonomi mengacu pada upaya untuk memahami kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya. Yang masuk cakupan ekonomi sebagai ilmu seperti hukum hasil yang berkurang (*law of diminishing returns*), hukum penawaran dan permintaan (*law of supply and demand*), dan lain-lain.

Didasarkan pada pandangan Baqir Ash Shadr tersebut, terlihat perbedaan mendasar antara sistem dan ilmu ekonomi. Sistem ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal dan atau cita-cita kehidupan.

Tujuan dan strategi pembangunan pada prinsipnya dipengaruhi oleh pandangan hidup yang dianut oleh masyarakatnya, atau dengan kata lain pilihan tujuan dan strategi dari sebuah sistem ekonomi adalah hasil logis dari pandangannya terhadap dunia. Tentu saja, bisa terjadi sebuah sistem ekonomi mengambil tujuan-tujuannya dari suatu pandangan hidup, tetapi strategi yang dipakai diambil dari pandangan hidup yang lainnya. Sehingga dampaknya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Umar Chapra akan terjadi konflik antara tujuan dan strategi. Konflik ini tidak saja akan menyulitkan sistem itu

⁶ Lihat Baqir Ash Shadr, M., Buku Induk Ekonomi Islam “Iqtishaduna”, edisi terjemahan, (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 80-88

untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, tetapi juga akan menambah jumlah problem sosioekonomi yang tidak terpecahkan dan sulit itu.⁷

Oleh karena itu kegagalan pembangunan di dunia Muslim terutama yang memaksakan sistem kapitalisme dan sosialisme sebagai rujukan utama selalu mengalami kegagalan karena pilihan tujuan dan strategi pembangunannya berbeda dengan pandangan hidup yang diajarkan Islam. Sehingga setiap pembahasan tentang pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, haruslah terlebih dahulu melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuannya yang seirama dengan pandangan tadi serta jenis pembangunan yang berkaitan dengannya.

Pembangunan ekonomi menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial. Biasanya dihitung dalam istilah per kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu.

Literatur tentang ekonomi pembangunan cukup banyak, tetapi umumnya tidak mampu menyelesaikan masalah kompleks pembangunan negara-negara berkembang, khususnya dalam dunia Islam. Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik ekonomi Barat. Teori demikian jelas tidak bisa secara serta-merta diaplikasikan di dunia Muslim. Terlebih lahir dari teori kapitalis. Karena kelemahan mendasar inilah, maka teori tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan pembangunan yang cukup kompleks dan dinamis.

C. Filosofi Dasar Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai

⁷ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, edisi terjemahan, hal. 5

agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Khurshid Ahmad meletakkan empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu:

1. Tauhid , yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya;
2. Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam;
3. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
4. Tazkiyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara.

Konsep tauhid meletakkan peraturan-peraturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesama. Konsep rububiyah berarti mengakui sifat Allah sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan bagi menampung dan menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan. Konsep ini merupakan undang-undang asasi dalam alam jagat yang merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembanguan sumber supaya berguna, saling tolong-menolong dan saling bersekutu di antara mereka dalam kebaikan. Konsep khilafah menempatkan manusia selaku khalifah di muka bumi ini yang bertanggungjawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial dan juga prinsip organisasi sosial bagi manusia. Sementara konsep tazkiyah berperan dalam penyucian hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Artinya, konsep ini mengajarkan manusia untuk membangun dirinya yang akhirnya dapat membangun semua dimensi kehidupannya termasuk dimensi ekonomi. Hasilnya adalah falâh, yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
3. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
4. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Konsep-konsep Islam menginspirasi seluruh kehidupan seorang Muslim. Kepercayaan pada keesaan Sang Pencipta alam semesta ini melimpahkan suatu kesatuan dasar pada berbagai lapisan masyarakat. Konsep Ilahi (Rububiyah) mencegah manusia dari kesombongan yang merupakan ciri dari peradaban modern. Konsep khilafah dan tazkiyyah menjadi fondasi pada kebijakan pembangunan, memberikan kepada manusia rasa tanggung jawab dalam menjalankan urusan dunia dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan alam yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, konsep pembangunan ekonomi didefinisikan secara komprehensif.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia, dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah.

D. Konsep Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya melihat aspek kebendaan dan fisik semata yang mengabaikan aspek pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual diri manusia itu sendiri. Sebaliknya konsep pembangunan ekonomi dalam Islam menurut teoritikus ekonomi Islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Pembangunan ekonomi Islam meliputi pembangunan akhlak, spiritual dan kebendaan.⁸ Aspek akhlak, spiritual, kebendaan, sosial dan ekonomi tidak boleh dipisahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosio-ekonomi dalam Islam. Pembangunan harus diorientasikan pada pengembangan manusia dari semua dimensinya. Kepuasan manusia tidak hanya terwujud saat kebutuhan ekonominya tercukupi tapi juga kebutuhan spiritual dan non materi lainnya.

Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (*driving force*) pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia merangkum seluruh potensi, keberdayaan dan kualitas manusia dari sudut materi, spiritual dan moral. Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem keuangan dan dasar perniagaan secara adil.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang

⁸ Joni Tamkin bin Borhan, "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam", Jurnal Ushuluddin, Vol. 27, 2008, hal. 95

menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

E. Tujuan Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Berdasarkan paradigma ekonomi konvensional setidaknya terdapat dua tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Pertama meningkatkan pendapatan riil per-kapita. Kedua menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Namun jika dilihat fakta di lapangan justru masalah terbesar dalam perekonomian modern ini khususnya di negara-negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya diperparah oleh tingkat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian hanya digerakkan oleh segelintir orang dan tentunya juga dinikmati oleh segelintir orang tersebut. Artinya adalah permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi di antara sesama mereka.

Islam dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak menafikkan aspek pendapatan individu sebagai salah satu indikatornya. Karena Islam sangat mendambakan suatu masyarakat yang sejahtera secara materi agar mereka dapat melaksanakan kewajiban agamanya secara sempurna. Namun disisi lain Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan adil. Bahkan Islam menciptakan instrumen secara spesifik untuk mencapai distribusi tersebut melalui mekanisme Zakat, Infaq dan Sodaqah (ZIS) serta penumbuhan sifat kepedulian dan saling tolong-menolong di antara sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar.

Tujuan pokok pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan melalui terpenuhinya segala kebutuhan pada taraf hidup sejahtera. Adapun tujuan secara umum adalah terwujudnya keadilan distribusi, efisiensi pendayagunaan sumber daya ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumberdaya manusia. Sementara menurut Afar⁹ tujuan pembangunan adalah menciptakan

⁹ Lihat Afar dalam Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hal. 58

segala sesuatu yang dikehendaki dalam maqashid syari'ah, sebagai hak-hak dasar setiap individu. Berupa lima masalah pokok (al-dharuriyat al-khams), terkait dengan segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Selain itu juga pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antara daerah, serta memperhatikan kepentingan generasi mendatang berkenaan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara Muslim harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan.

F. Maqashid Syari'ah Sebagai Indikator Pembangunan

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah terciptanya keadilan distribusi; berarti tercapainya minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan pemeliharaan maqashid syari'ah, yang terdiri dari lima masalah pokok, berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, akan menimbulkan problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera.

Al-Syatibi menganggap bahwa tujuan syariah (maqashid syari'ah) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.¹⁰ Kemaslahatan manusia dapat teralisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dikembangkan, dijaga dan dilestarikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁰ Umar Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan, hal. 5

Sementara itu menurut Al Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya. Ia selanjutnya mengklasifikasikan maqashid (tujuan) ke dalam empat pembagian utama, yaitu dengan mengatakan:¹¹

“The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (din), their self (nafs), their intellect (,aql), their posterity (nasl), and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these five serves public interest and is desirable, and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable.”

Oleh karena itu, dengan jelas Al Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan. dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.

Al Ghazali kemudian membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dharuriyat adalah merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, hidup, akal, keturunan dan harta). Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mengancam eksistensi kehidupan manusia dan akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat. Dan pemeliharaan dan pelestarian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia.

Sementara hajiyat adalah dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan peeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Dan tahsiniyat adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak bermaksud untuk menghilangkan

¹¹ Ibid, hlm. 35

atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Indikator-indikator pembangunan ekonomi yang didasarkan pada maqashid syari'ah (*al-dharuriyat al-khams*) dapat dilihat dari:¹²

1. Pemeliharaan agama

Jika pokok-pokok ibadah seperti "iman", mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, haji dan lain-lain, adalah sebagai indikator bagi terpeliharanya keberadaan agama, maka segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan - baik materil maupun non materil, sarana barang dan jasa - untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut antara lain merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana, barang dan jasa yang dikemukakan „Abd al-Mun'im „Afar adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah maka setidaknya perlu disediakan antara lain: jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk Al-Quran dan Al Hadist, pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- b. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari:
 - Sholat: dibutuhkan mesjid dan mushollah, jasa imam dan muadzin, dana-dana waqaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
 - Zakat: pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para muzakki dan pemetaan sebaran mustahiq zakat, penegakan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat, pembentukan lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukum-hukum agamanya.
 - Puasa: lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya

¹² Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hal. 124-138

pelaksanaan puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan ramadhan.

➤ Haji: pembentukan lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, penyediaan alat transportasi dan penginapan yang nyaman dan lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji.

c. Lembaga peradilan: dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam.

d. Lembaga keamanan: jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara dan memberikan hukuman bagi para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.

2. Pemeliharaan jiwa dan akal

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa dan akal meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah). Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pembangunan ekonomi harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa).

Pemeliharaan keselamatan jiwa menurut Afar meliputi sembilan bidang pokok:

1. Makanan: makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam.
2. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan
3. Pakaian
4. Perumahan
5. Pemeliharaan kesehatan: ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obat, dokter, ambulans, dan lain-lain.

6. Transportasi dan telekomunikasi: alat transportasi darat, laut dan udara dan alat-alat komunikasi
7. Keamanan: jasa keamanan bagi individu dan masyarakat
8. Lapangan pekerjaan: pekerjaan yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman
9. Lindungan sosial: lembaga pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para penganggur dan jaminan sosial.

Pemeliharaan akal dapat terdiri dari:

1. Pendidikan: penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar.
2. Penerangan dan kebudayaan
3. Penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain.

Indikator kesuksesan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memelihara jiwa dan akal manusia. Semua elemen-elemen penunjang dari pemeliharaan jiwa dan akal adalah mutlak disediakan.³⁸

3. Pemeliharaan keturunan dan harta

Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh kerennya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik melalui proses tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan.

Sementara harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana

untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam. Harus ada filter moral dalam pengelolaannya.

Untuk menjaga keselamatan keturunan dan harta maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan:¹³

a. Pemeliharaan keturunan

- Lembaga pernikahan: mempermudah legalitas pernikahan, pembelakan pra pernikahan, pembinaan rumah tangga paska pernikahan, dan lain-lain.
- Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
- Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang mampu.
- Yayasan anak yatim: pusat pemeliharaan anak-anak yatim.

b. Pemeliharaan harta

- Pembentukan lembaga keuangan dan investasi
- Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta
- Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi.
- Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan aka-akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa, dan lain-lain.

¹³ Afar dalam Saifullah, Ekonomi Pembangunan Islam, hal. 76

- Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam barang dan jasa primer, sebagai sarana yang harus dihasilkan dalam proses pembangunan dengan perencanaan yang tepat disertai anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, pembangunan berbasis *maqâshid syari'ah* adalah pembangunan yang meletakkan prioritas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia demi terpeliharanya lima masalah pokok (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta) melalui usaha dalam proses produksi atau pembangunan ekonomi.

Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan atau tercipta kesejahteraan. Dan sebaliknya apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan merasakan ketidakpuasan, tidak damai, tidak senang, tidak bahagia, tidak aman. Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera. Ketidakadaan kesejahteraan akan berdampak pada terganggunya lima masalah pokok. Oleh karenanya Al Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.¹⁴

Peningkatan pendapatan dan kekayaan melalui pembangunan adalah suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan, akan tetapi untuk

¹⁴ Lihat Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah*, (Jedah: ITIE Book, 2008), hal. 7

mencapai kesejahteraan yang sebenarnya tidak boleh hanya berhenti di situ. Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar akan spiritual atau non material. Sejalan dengan Pramuwito yang mengkategorikan kondisi sejahtera jika apabila kebutuhan jasmaninya terpenuhi yang meliputi: bebas dari kelaparan, kekurangan akan pakaian, kekurangan akan perumahan, air dan udara; terjaminnya kesehatannya, tidak mengalami kesulitan dalam menjaga kesehatan dengan terjaminnya fasilitas-fasilitas kesehatan; dan kebutuhan rohaninya yang bebas dari rasa takut, cemas dan terancam. Terpenuhinya kebutuhan sosial, termasuk bebas dari berbagai ancaman dan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis.

Dengan demikian terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi yang berbasis maqashid syari'ah (al-dharuriyat al-khams) dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, dan juga hubungannya dengan kondisi kesejahteraan, yang bila disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah merupakan predisposisi dari kesejahteraan, dalam arti kesejahteraan sosial akan ditentukan oleh bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya.

G. Model Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Islam lebih dari itu. Bagi Islam pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan individu beserta umat. Tujuan utama pembangunan menurut Islam mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak atau biasa disebut sebagai falah.

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang tinggi adalah indikator ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Mencari kenyamanan hidup adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam

bahkan dianjurkan selama tidak tenggelam dalam buaian hawa nafsu yang membuat lupa kepada Allah.

Namun demikian, pertumbuhan pendapatan yang tinggi tidaklah cukup untuk menyediakan kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup terhadap semua populasi manusia. Karena, meskipun tingkat pendapatan tinggi tetapi tidak terdistribusi secara merata dan adil, maka hanya sebagian atau sekelompok tertentu saja yang akan menikmati pertumbuhan dan perkembangan pendapatan tersebut, sementara yang lain mengalami yang sebaliknya, yaitu kesengsaraan, kekurangan dan kemiskinan. Kondisi tersebut tidak diinginkan oleh Islam. Justru Islam menganjurkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan disaat bersamaan menghendaki terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan dalam perekonomian, menjadi insentif bagi usaha manusia untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan mencapai pertambahan pendapatan dan kekayaan. Anjuran Islam terhadap kegiatan ekonomi bukan untuk mengakumulasi modal, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemiskinan membuat individu tidak dapat menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya, oleh karena itu setiap manusia dianjurkan untuk selalu berdoa untuk dihindarkan dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan. Bahkan kemiskinan akan mengantarkan kepada kakufuran penyebab maju dan runtuhnya sebuah peradaban dalam bentuk model dinamis berbasis pendekatan multidisiplin.¹⁵

H. Kesimpulan

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara Barat sekuler mendorong sebagian negara-negara Muslim – masuk kategori negara berkembang – menjadikannya sebagai kiblat model dalam mendesain pembangunan ekonominya. Model-model pembangunan yang sukses dikembangkan di negara-negara maju dianggap sebagai pengalaman empiris yang bisa diduplikasi dan diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Muslim. Atas dasar asumsi inilah kemudian studi ilmu ekonomi pembangunan yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai kajian

utamanya mulai dipelajari dan diterapkan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali negara-negara Muslim.

Namun, model dan pengalaman empiris yang berkembang di dunia Barat tidak serta merta bisa diterapkan dan sukses di dunia Muslim, hal ini disebabkan perbedaan kultur-budaya, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang diterapkan di dunia Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, liberalisme dan kapitalisme. Sementara dunia Muslim justru menjadikan agama sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara model pembangunan yang diterapkan di dunia Barat dan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dan tujuan dari ajaran Islam (maqashid syari'ah).

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang seharusnya diterapkan di dunia Muslim harus berbasis pada maqâshid syari'ah yaitu terciptanya keadilan distributisi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi harus menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁵ Lihat Umar Chapra, *Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi*, (Jakarta: Amzah, 2009), ham. 25- 28

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi. Jakarta: Amzah, 2009.
- _____, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah. Jedah: ITIE Book, 2008.
- Ash Shadr, Baqir. M. Buku Induk Ekonomi Islam “Iqtishaduna”, edisi terjemahan, Jakarta: Zahra, 2008.
- Chapra, Umar. Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2000
- Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: RajaGrafindo, 1993.
- Saifullah, Ekonomi Pembangunan Islam, Bandung: Gunungdjati Press, 2012.
Tamkin, Joni bin Borhan, “Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam”, Jurnal Ushuluddin, Vol. 27, 2008.